OPERASI TRIKORA SEBAGAI UPAYA MENGEMBALIKAN IRIAN BARAT KE WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Theresia Ngilan Bupu[1)], I Ketut Laba Sumarjiana[2)]

Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Mahasaraswati Denpasar
E-mail: sumarjiana1958@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana proses operasi Trikora dilakukan sebagai upaya mengembalikan Irian Barat ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (2) mengetahui apakah upaya-upaya yang dilakukan Bangsa Indonesia untuk mengembalikan Irian Barat ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah yaitu: (1) pengumpulan sumber/*heuristic* (studi dokumen, teknik wawancara, teknik observasi; (2) kritik sumber (kritik intern dan kritik ekstern); (3) interpretasi; dan (4) penulisan sejarah/*historiografi*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan dilaksanakan Operasi Trikora sebagai upaya mengembalikan Irian Barat ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ditempuh melalui berbagai upaya yaitu: upaya diplomasi politik, ekonomi, konfrontasi dan pergerakan militer. Pada tahun 1969 diselenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat, yang merupakan bagian dari persetujuan New York Indonesia. Hasil dari Penentuan Pendapat Rakyat memutuskan secara bulat bahwa Irian Barat tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata kunci : Operasi Trikora, Irian Barat, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

ABSTRACT

This study aims to (1) find out how the Trikora operation process was carried out as an effort to return West Irian to the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia (2) to find out whether the efforts made by the Indonesian people to return West Irian to the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. This study uses a historical approach, namely: (1) collection of sources / heuristics (document study, interview techniques, observation techniques; (2) source criticism (internal criticism and external criticism); (3) interpretation; and (4) history / historiography writing The results of this study indicate that the Trikora Operation was carried out as an effort to restore West Irian to the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia, which was pursued through various efforts, namely: political diplomacy, economic efforts, confrontation and military movements.1969, a Public Opinion Determination was held, which was part of the New York Indonesia Agreement. The results of the Popular Opinion Determination unanimously decided that West Irian would remain part of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

Keywords: *Operation Trikora, West Irian, Republican Unitary State Indonesia.*

PENDAHULUAN

Irian Barat merupakan sebuah propinsi terluas di Indonesia yang terletak ditepi bagian barat pulau Irian. Nama Irian dikenal juga dengan sebutan West New Guenea. Nama propinsi ini di ganti menjadi Papua sesuai UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Pada tahun 2003, disertai oleh berbagai protes (penggabungan antara Papua Tengah dengan Papua Timur), Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah Indonesia, bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya menjadi provivnsi Irian Jaya (setahun kemudian menjadi Papua Barat).

Dalam sidang BPUPKI telah menyepakati bahwa wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda, yang terbentang dari Sabang sampai Marauke, dari provinsi Aceh sampai Irian Barat. Maka pada saat Indonesia merdeka pada tahun tahun 1945, Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia karena masih memiliki hasrat untuk menjajah. Maka Belanda melancarkan agresi militernya (mereka menyebutnya dengan aksi polisional): Agresi militer Belanda 1, 21 Juli 1947 karena pelanggaran perjanjian Linggarjati dan Agresi militer Belanda II, 19 Desember 1948 karena pelanggaran perjanjian Renville. Maka Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Jika mereka mengakui secara tidak langsung mereka melakukan agresi ke negara lain, dan ini membuat mereka dituntut atas tuduhan melakukan kejahatan perang atas sebuah negara (mirip AS yang menyerang Irak, mereka tidak datang atas nama "Agresi" tetapi "Pembebasan".). Hal lainnya adalah mereka harus melakukan ganti rugi secara finansial, dan semua yang gugur dalam Aksi Polisional ini tidak bisa dikatakan sebagai pahlawan, melainkan penjahat perang. Hal inilah yang membuat Ratu Belanda tidak pernah meminta maaf untuk aksi polisional. Dalam upacara kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan pengakuan secara simbolik yang mereka anggap merdeka dengan perjanjian damai (KMB).

Notosutardjo (1984:331), Salah satu keputusan dalam Konferensi Meja Bundar (27 Desember 1949) Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya kecuali wilayah Irian Barat yang rencananya akan dikembalikan setahun kemudian. Namun setelah pengakuan kedaulatan, Belanda tidak juga menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia.Untuk masalah tersebut

kemudian dicapai suatu kompromi bahwa Irian Barat akan diselesaikan dengan jalan perundingan antara Negara Indonesia dan Belanda.Setelah setahun Irian masih tetap dikuasai oleh Belanda. Pada sidang Majelis Umum tahun 1957 Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan dalam pidatonya, bahwa Indonesia akan menempuh "jalan lain" untuk menyelesaikan sengketa Irian dengan Belanda.

Dalam upaya membebaskan wilayah Irian Barat dari cengkeraman Belanda Pemerintah RI pertama mengambil langkah diplomasi yang dilakukan secara bilateral baik dengan pemerintah Belanda maupun dengan dunia Internasional. Perundingan (Diplomasi) dengan pemerintah Belanda terjadi pertama kali pada masa kabinet Natsir tahun 1950 tetapi gagal, bahkan pada tahun 1952 secara sepihak Belanda memasukkan Irian Barat dalam wilayah kerajaan Belanda. Upaya diplomasi internasional dilakukan oleh kabinet Sastroamijoyo yaitu dengan membawa masalah Irian Barat ke forum PBB, tetapi tidak membawa hasil. Pada masa kabinet Burhanuddin, Belanda menanggapi bahwa masalah Irian Barat merupakan masalah antara Indonesia-Belanda dan mengajukan usul yang berisi tentang penempatan Irian Barat di bawah Uni Indonesia-Belanda. Disamping membawa masalah Irian Barat ke forum PBB Indonesia juga melakukan pendekatan dengan negara-negara Asia Afrika dan ini membawa hasil yang positif, antara lain: dalam Konferensi Pancanegara II di Bogor lima negara peserta sepakat mendukung Indonesia dalam mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia dan dalam KAA para peserta mengakui bahwa wilayah Irian Barat merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Karena Belanda tidak pernah menunjukkan etikad baik dalam menyelesai masalah Irian Barat maka pemerintah RI mengambil langkah-langkah sebagai berikut : 1) Hubungan Indonesia-Belanda diubah dari united status menjadi hubungan biasa. 2) Pada tanggal 3 Mei 1956 melakukan pembatalan hasil-hasil KMB. 3) Pada tanggal 17 Agustus 1956 membentuk Provinsi Irian Barat yang berkedudukan di Soasiu dan menunjuk Sultan Tidore, Zaenal Abidin Syah sebagai gubernurnya. 4) Pada tanggal 18 November 1957 diadakan rapat umum pembebasan Irian Barat. 5) Pada tanggal 5 Desember 1957 melarang semua film yang berbahasa Belanda, kapal terbang Belanda juga dilarang mendarat dan terbang di

wilayah RI. 6) Pada tanggal 5 Desember 1958 melakukan penghentian semua kegiatan konsuler Belanda di Indonesia. 7) Dengan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1958 dilakukan pengambilalihan modal Belanda di Indonesia. 8) Pada tanggal 19 Februari 1958 dibentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat. 9) Pada tanggal 17 Agustus 1960 memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda. 10) Menasionalisasi 700 perusahaan milik Belanda di Indonesia.

Sementara itu pemerintah Belanda meningkatkan kekuatan militernya dengan mengirimkan Kapal Induk Karel Doorman ke Irian Barat. Situasi semakin memanas dan pada sidang majelis umum PBB tahun 1961 kembali dibicarakan masalah Irian Barat kepada Indonesia dengan perantara PBB. Pemerintah Indonesia menyetujui usul tersebut dengan syarat waktunya dipercepat. Sedangkan Belanda menyatakan akan melepaskan Irian Barat untuk dilanjutkan di Dewan Perwakilan PBB kemudian membentuk Negara Papua. Pemerintah berkesimpulan Belanda tidak ingin menyerahkan Irian Barat pada Indonesia, sehingga tidak ada jalan lain dan arus diselesaikan dengan kekerasan senjata.

Pada tanggal 19 Desember 1961, Soekarno (Presiden Indonesia) mengumumkan pelaksanaan Trikora di Alun-alun Utara Yogyakarta. Realisasi pertama dari Trikora adalah pembentukan Komando Operasi yang diberi nama Komando Mandala pembebasan Irian Barat. Soekarno juga membentuk Komando Mandala, dengan mengangkat Mayor Jendral Soeharto sebagai panglima. Tugas komando adalah merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua bagian Barat dengan Indonesia. Operasi Trikora (Trikomando Rakyat) adalah konflik dua tahun yang dilancarkan oleh Bangsa Indonesia terhadap Belanda untuk menggabungkan Irian Barat ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga merupakan suatu operasi amfibi terbesar yang pernah dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia. Dalam Operasi tersebut, TNI diberikan tugas untuk melakukan pendaratan amfibi disalah satu pantai di Irian Barat yang masih diduduki oleh Belanda.Dalam upaya melaksanakan tujuan tersebut, Komando Mandala membuat strategi dengan membagi operasi pembebasan Irian Barat menjadi tiga fase, yaitu Fase infiltrasi, Fase Eksploitasi, Fase Konsolidasi. Adi Sudirman, (2014:324)

Sebelum Komando mandala bekerja aktif, unsur militer yang

tergabung dalam Motor Boat Torpedo (MTB) telah melakukan penyusupan ke Irian Barat. Namun kedatangan pasukan ini diketahui oleh Belanda, sehingga pecah pertempuran di Laut Arafura. Dalam pertempuran yang sangat dahsyat ini, MTB Macan Tutul berhasil ditenggelamkan oleh Belanda dan mengakibatkan gugurnya komandan MTB Macan Tutul Yoshafat Sudarso (Pahlawan Trikora)

Sementara itu Presiden Amerika Serikat yang baru saja terpilih John Fitzgerald Kennedy merasa risau dengan perkembangan yang terjadi di Irian Barat. Dukungan Uni Soviet kepada perjuangan RI untuk mengembalikan Irian Barat dari tangan Belanda, menimbulkan terjadinya ketegangan politik dunia, terutama pada pihak Sekutu (NATO) pimpinan Amerika Serikat yang semula sangat mendukung Belanda sebagai anggota sekutunya. Apabila Uni Soviet telah terlibat dan Indonesia terpengaruh kelompok ini, maka akan sangat membahayakan posisi Amerika Serikat di Asia dan dikhawatirkan akan menimbulkan masalah Pasifik Barat Daya. Apabila pecah perang Indonesia dengan Belanda maka Amerika akan berada dalam posisi yang sulit. Amerika Serikat sebagai sekutu Belanda akan di cap sebagai negara pendukung penjajah dan Indonesia akan jatuh dalam pengaruh Uni Soviet.

Untuk itu, dengan meminjam tangan Sekjend PBB U Than, Kennedy mengirimkan diplomatnya yang bernama Elsworth Bunker untuk mengadakan pendekatan kepada Indonesia – Belanda. Sesuai dengan tugas dari Sekjend PBB (U Than), Elsworth Bunker pun mengadakan penelitian masalah ini, dan mengajukan usulan yang dikenal dengan "Proposal Bunker". Adapun isi Proposal Bunker tersebut adalah sebagai berikut: "Belanda harus menyerahkan kedaulatan atas Irian barat kepada Indonesia melalui PBB dalam jangka waktu paling lambat dua tahun" usulan ini menimbulkan reaksi: Dari Indonesia meminta supaya waktu penyerahan diperpendek dan dari Belanda setuju melalui PBB, tetapi tetap diserahkan kepada Negara Papua Merdeka.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang Operasi Trikora Sebagai Upaya Mengembalikan Irian Barat Ke Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

1) Bagaimana proses Operasi Trikora dilakukan untuk mengembalikan Irian Barat ke

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia?

2) Apakah yang dilakukan Bangsa Indonesia sebagai upaya untuk mengembalikan Irian Barat ke Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kepustakaan dan penulisan historis. Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, kerangka-kerangka ilmiah, ensiklopedia sumber tertulis maupun elektronik. Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang melandasi suatu masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan studi kepustakaan. Peneliti mempergunakan penelitian kepustakaan karena data yang diambil adalah data literature dan penulisan historis.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode historis, karena objek kajiannya berupa peristiwa masa lampau. Metode historis berarti seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis. Metode historis dapat juga berarti sebagai proses menguji dan menganalis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Moleong,1990:239).

Tujuan penelitian historis adalah untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintesiskan bukti-bukti untuk menegakan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Tahap-tahap penelitian historis meliputi heuristik (pelacakan dan pengumpulan sumber-sumber sejarah), melakukan kritik ekstrernal dan internal, melakukan penafsiran atau interpretasi, dan penulisan sejarah atau historiografi. Sebelum melakukan penelitian, perlu adanya prosedur penelitian terlebih dahulu karena dapat mempermudah cara kerja dan memperlancar jalannya proses penelitian. Penelitian ini menggunakan metode historis, sehingga prosedur penelitian yang harus dilalui meliputi empat tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi (Moleong, 1990:239).

Pertama, *heuristik* yaitu suatu teknik mencari dan mengumpulkan sumber. Jadi Heuristik adalah tahap mencari, mengumpulkan, menghimpun sumber-sumber, jejak- jejak sejarah yang relevan yang diperlukan untuk dijadikan informasi (Hotosuesanto, 1984:20). Tahap ini merupakan tahap pertama yang harus dilakukan dalam merekonstruksi masa lampau. Ketika kita akan merekonstruksi masa lampau, kita harus melakukan pencarian sumber. Dalam pencarian sumber perlu diketahui mengenai jenis-jenis sumber. Sumber dapat dibagi menjadi tiga yaitu sumber tertulis (dokumen, arsip, buku, Koran), sumber benda (foto), dan sumber lisan. Berdasarkan asal-usulnya, sumber dapat dibagi menjadi tiga (dua yang utama), yaitu sumber primer (pelaku, saksi), sumber sekunder (orang yang tidak sezaman dengan peristiwa), sumber tersier (karya ilmiah). Penelusuran sumber-sumber ini dapat dilakukan ditempat yang memungkinkan seperti perpustakaan, arsip nasional/daerah, museum, dan dokumen pribadi atau lembaga.

Kedua, *Kritik Sumber* yaitu sumber untuk penulisan sejarah ilmiah bukan sembarang sumber, tetapi sumber-sumber itu terlebih dahulu harus dinilai melalui kritik ekstern dan kritik intern.Kritik ekstern menilai, apakah sumber itu benar-benar sumber yang diperlukan,apakah sumber itu asli, turunan, atau palsu. Dengan kata lain, kritik ekstern menilai keakuratan sumber (otentisitas). Kritik intern menilai kesahihannya data sumber (kredibilitas). Keaslian sumber (otensitas) adalah peneliti melakukan pengujian atas asli tidaknya sumber, berarti ia menyeleksi lagi segi-segi fisik dari sumber yang ditemukan.

Ketiga, *Interpretasi atau penafsiran sejarah* disebut juga dengan analisis sejarah. Analisis sejarah bertujuan untuk melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber (Hotosuesanto, 1984:21). Jadi interpretasi untuk mendapatkan makna dan saling berhubungan antara fakta yang satu dengan yang lainnya. Data atau sumber sejarah yang dikritik akan menghasilkan fakta yang akan digunakan dalam penulisan sejarah. Fakta-fakta sejarah harus diinterpretasikan atau ditafsirkan agar sesuatu peristiwa dapat direkonstruksi dengan baik, yakni dengan jalan menyeleksi, menyusun, mengurangi tekanan, dan menempatkan fakta dalam urutan kausal.

Keempat, *Historiografi* adalah penyajian hasil interpretasi fakta dalam bentuk tulisan. Dapat dikatakan historiografi sebagai puncak dari

rangkaian kerja seorang sejarawan, dan dari tahapan inilah dapat diketahui baik buruknya hasil kerja secara keseluruhan Oleh karena itu dalam penulisan diperlukan kemampuan menyusun fakta-fakta yang bersifat fragmentaris kedalam tulisan yang sistematis, utuh dan komunikatif. Dalam penulisan sejarah aspek kronologi sangat penting.

Lokasi penelitian berada di perpustakaan yang ada di Denpasar seperti: perpustakaan UNMAS DENPASAR.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian studi pustaka yang dilakukan peneliti bahwa proses operasi Trikora yang dilakukan Bangsa Indonesia sebagai upaya mengembalikan Irian Barat ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah karena dalam Sidang BPUPKI telah menyepakati bahwa wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda, yang terbentang dari Sabang sampai Marauke, dari provinsi Aceh sampai Irian Barat. Maka pada saat Indonesia merdeka pada tahun tahun 1945, Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia karena masih memiliki hasrat untuk menjajah. Maka Belanda melancarkan agresi militernya (mereka menyebutnya dengan aksi polisional).

Pada tanggal 19 Desember 1961 Presiden Soekarno selaku Panglima tertinggi ABRI menggumumkan Tri Komando Rakyat di Yogyakarta dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat. Menindaklanjuti perintah Tri Komando Rakyat yang diperintahkan oleh Presiden Soekarno bahwa pembentukan Komando Mandala pada tanggal 2 Januari 1962 yang bersifat gabungan (unified command) dari unsur AD, AL, dan AU yang meliputi wilayah Indonesia bagian Timur dengan tugas: Menyelenggarakan operasi-operasi militer dalam perjuangan merebut wilayah Irian Barat yang diduduki Belanda,dan sebagai tindak lanjut pembentukan Komando Mandala tersebut, maka harus segera disusun organisasi dan personilnya.

Dilihat dari kekuatan alutsista dari Indonesia dan Belanda, Indonesia tertinggal jauh dari Belanda. Indonesia mengambil beberapa cara diantaranya melakukan pembelian Alutsita ke negara Uni Soviet yang nantinya akan memperkuat kekuatan militer di tiga matra yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Namun sebelum operasi hari H untuk melakukan penembakan terjadi

genjatan senjata. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan kapal selam darikesatuan korps hiu kencana yang berhasil melakukan operasi penyusupan dan mendaratkan pasukan dengan keberhasilan kapal selam. Korps hiu kencana Indonesia mampu mengendalikan alur peperangan dengan Belanda. Dengan keberhasilan tersebut memaksa Belanda untuk mengambil jalan damai yaitu genjatan senjata dan menyerahkan Irian Barat kembali ke Indonesia. Kapal selam mampu memberikan dampak sikologisterhadap musuh dan sebaliknya juga dapat memberikan semangat terhadap pasukan Indonesia. Maka tidak dapat dipungkiri lagi kapal selam memiliki nilai strategis bagi Angkatan laut Indonesia dalam usaha merebut Irian Barat.

Gambar 1. Kapal Perang Indonesia Indonesia (Sumber: Sejarah Nasional Indonesia)

Kapal perang Indonesia sedang melakukan patroli di laut Aru di dekat wilayah perairan Irian Barat dengan kapal perang dan pesawat Angkatan Laut Belanda. Dalam patroli ini turun pula pejabat-pejabat tinggi dari Markas Besar Angkatan Laut (MBAL), yaitu Komodor Yos Soedarso, Deputy KSAL, Kolonel Soedomo, Kepala Direktorat Operasi MBAL, Kolonel Moersid, Asisten II Kasad, serta perwira-perwira staf lainnya. Para perwira tinggi dan senior ini bermaksud meninjau lebih dekat medan laut terdepan di daerah perbatasan Trikora untuk penyusunan rencana-rencana operasi. Pada tanggal 15 Januari 1962 ketika jam menunjukan pukul 12:15 waktu 1 (zone time) malam hari, di angkasa terlihat dua buah pesawat yang terbang pada ketinggian 3.000 kaki melintasi formasi patroli ALRI. Dari bayangan yang terlihat diperkirakan bahwa pesawat-pesawat terbang itu adalah milik Belanda jenis Neptune dan Firefly. Kedua kapal itu adalah dua buah kapal perusak, milik Belanda, yang menyebabkan terbakar dan tenggelamnya kapal perang Indonesia bersama-sama dengan Komodor Yos Soedarso dan Kapten Wiratno, serta beberapa awak kapalnya. Pertempuran ini pecah pada tanggal 15 Januari 1962 dan menenggelamkan KRI Macan Tutul serta mengugurkan Komodor Yos Sudarso yang telah menyerukan

pesan terakhirnya yang terkenal, yaitu "Kobarkan semangat Pertempuran !".

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Bangsa Indonesai dalam mengembalikan Irian Barat ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pertama melalui upaya diplomasi politik, upaya diplomasi sudah dimulai sejak kabinet Natsir (1950) yang selanjutnya dijadikan program oleh setiap kabinet. Meskipun selalu mengalami kegagalan Belanda masih menguasai Irian Barat bahkan secara sepihak memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah kerajaan Belanda. Perjuangan secara diplomsi ditempuh dengan dua tahap, yaitu: a) secara bilateral melalui perundingan dengan Belanda. b) Diplomasi dalam forum PBB. Pemerintah Indonesia membawa masalah Irian Barat di dalam acara Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa, upaya Indonesia menemui kegagalan karena tidak pernah memperoleh tanggapan yang positif dari sebagian besar anggota PBB. Kedua melalui upaya Ekonomi, sampai tahun 1957 upaya melaui jalan damai belum membawa hasil, maka Bangsa Indonesia mengambil-alih salah satunya adalah Nasionalisasi de javasche Bank menjadi Bank Indonesia tahun 1951.

Ketiga melalui Konfrontasi, tanggal 4 Desember 1950 diadakan konferensi Uni Indonesia Belanda. Dalam konferensi itu Indonesia mengusulkan agar Belanda menyerahkan Irian Barat secara *de jure*, namun ditolak oleh Belanda.Karena mengalami kegagalan dan tidak ada itikad baik dari Belanda untuk menyelesaikannya, maka pemerintah Indonesia mengambil jalan konfrontasi. Pemerintah Indonesia secara bertahap mulai mengambil langkah yang konkrit dalam pembebasan Irian Barat. Keempat melalui pergerakan militer, Perjuangan Militer merupakan perjuangan melalui jalur perang atau konfrontasi bersenjatayang seringkali menjadi kekuatan yang paling ditonjolkan oleh suatu negara, dengan tujuan untuk menunjukan kesungguhan Indonesia dalam memperjuangkan apapun yang menjadi haknya, menunjukan sikap tidak kenal menyerah dalam merebut Irian Barat. Persiapan pemerintah untuk menggalang kekuatan militer adalah pada bulan Desember 1960 Indonesia mengirimkan misi ke Uni Soviet untuk membeli senjata dan perlengkapan perang lainnya. Tindakan Indonesia tersebut dianggap oleh Belanda sebagai upaya untuk melakukan Agresi. Sehingga Belanda kemudian memperkuat armada dan angkatan perangnya di Irian Barat dengan mendatangkan apal induk Karel Dorman.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Operasi Trikora dilakukan karena, Belanda mengingkari kesepakatan dalam sidang BPUPKI, dan juga karena Bangsa Belanda mengklaim status Irian Barat sebagai wilayah atau Negara kekuasaannya.
2. Upaya-upaya yang dilakukan Bangsa Indonesia dalam mengembalikan Irian Barat melaui jalan damai sudah dilakukan namun tidak membawa hasil yang positif. Sehingga pemerintah Indonesia secara bertahap mulai mengambil langkah yang konkrit yakni: upaya diplomasi politik, ekonomi, konfrontasi dan pergerakan militer.

DAFTAR PUSTAKA

Moleong.1990.*Metode Penelitian Sejarah.Jakarta :BalaiPustaka*

Nasir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia

Notosusanto. N.1984. *Masalah Penelitian Sejarah Kontenporer (suatu pengalaman).* Jakarta: Intidayu Press

Notosutardjo. 1984. *Dokumen Konferensi Meja Bundar. Jakarta. Balai Pustaka*

Notosusanto, Nugroho. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia Cetakan ke V dan VI*, Penerbit: Balai Pustaka.

Sudirman.A.2014. *Sejarah Lengkap Indonesia Dari Era Klasik Hingga Terkini.* Jogjakarta: Diva Press.